

## BAHASA AL QURAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK KEKUASAAN

*Ahmad Muradi*

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang, Jl. Gajayana 50 Malang, Telp. 085248069060, email: awfa\_  
muradi@yahoo.co.id

### Abstract

*Sociocultural study of Qur'an language is one of interesting parts in Qur'anic studies. It becomes noticed since Arabic language was chosen as the language of Qur'an. The point of view of this study is the political power of Quraisy when Quraisy held the power in Hijaz. The questions arise from this fact are (1) what is the reason of Arabic language (Quraisy language) chosen as Qur'an language, and (2) is there any relationship between Quraisy and its political power so that Arabic language was chosen as Qur'an language. Observations in historical aspect show that the Northern Arabic language survives because it is supported by political aspect and arabization. The standard fusha language appears as the result of the interaction with Arabic language (Quraisy). Quraisy political system, though did not reflect an absolute power that forced another ethnic groups, had shown a connection with the power factor of why Arabic language had been chosen as Qur'an language.*

*Studi sosiokultural terhadap bahasa al Quran merupakan salah satu bagian menarik di dalam ilmu-ilmu al Quran. Hal tersebut dikarenakan bahasa Arab digunakan sebagai bahasa al Quran. Sudut pandang dari studi ini adalah kekuasaan politis dari bangsa Quraisy pada saat bangsa ini memegang kekuasaan di Hijaz. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari fakta ini adalah, (1) apakah alasan dari dipilihnya bahasa Arab sebagai bahasa al Quran, dan (2) apakah terdapat hubungan antara kekuasaan politis bangsa Quraisy dengan terpilihnya bahasa Arab sebagai bahasa al Quran. Pengamatan yang dilakukan terhadap aspek historis menunjukkan bahwa bahasa Arab Utara bertahan karena didukung oleh aspek politis dan upaya arabisasi. Bahasa standar fusha muncul sebagai hasil dari interaksi dengan bahasa Arab tersebut.*

*Sistem politik Quraisy, walaupun tidak mencerminkan kekuasaan absolut yang memaksa kelompok-kelompok etnis lainnya, telah menunjukkan adanya hubungan dengan faktor kekuasaan yang menyebabkan bahasa Arab dipilih sebagai bahasa al Quran.*

*Key words: quran language, political power, sociocultural study*

### **Pendahuluan**

Kitab suci agama Islam adalah al Quran. Kata al Quran berasal dari bahasa Arab yaitu *qara'a*, *yaqra'u*, *qira'atan*, *qur'aanan* yang berarti bacaan. Kata *qara'a* tidak hanya berarti membaca, tetapi juga berarti memahami, merefleksi, merenung, berfikir dan mengambil i'tibar. Kata al Quran biasanya digandeng dengan kata al Karim, mulia sehingga menjadi al Quran al Karim atau bacaan yang mulia. Ia adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Kajian terhadap al Quran mendapat tempat tersendiri di hati para pemerhati, terutama kajian al Quran dalam perspektif budaya dan tradisi Arab. Pandangan ini berpangkal pada permasalahan *qadim* atau *hadits*-nya al Quran yang pada satu sisi ia adalah wahyu dari Allah SWT. Namun di sisi lain ia bersinggungan dengan utusan atau Rasul sebagai penyambung lidah dan tempat di mana ia diturunkan. Kajian-kajian para tokoh terkait dengan permasalahan di atas seperti (Sodikin, 2008: 12-21):

1. Nasr Hamid Abu Zayd dalam bukunya *Mafhum an Nash Dirasah fi Ulum al Quran* yang berkaitan dengan dialektika antara teks (al Quran) dengan konteks (situasi sosial masyarakat) mengungkapkan dialektika tersebut dengan mengkritisi konsep-konsep dalam ilmu-ilmu al Quran klasik. Penelitiannya bertujuan untuk menciptakan kesadaran ilmiah terhadap tradisi intelektual Arab Islam. Al Quran, dalam pandangannya diposisikan sebagai teks verbal yang berupa untaian huruf-huruf yang membentuk bahasa, yaitu bahasa Arab. Perangkat kebahasaan menjadi alat analisis yang sangat diperlukan untuk menjelaskannya. Analisisnya didasarkan pada dialektika antara teks dengan peradaban, baik konteks sebagai terbentuk oleh budaya maupun teks sebagai pembentuk budaya.
2. Aksin Wijaya dalam bukunya *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan: Kritik Atas Nalar Tafsir Gender* mengemukakan kuatnya otoritas tradisi Arab dalam penafsiran terhadap al Quran (mushaf Utsmani). Dengan pendekatan linguistik, khususnya linguistik strukturalis dan post-strukturalis, ia menunjukkan bias-bias tradisi Arab dalam penafsiran terhadap ayat-ayat

yang berkaitan dengan kedudukan perempuan.

3. Imam Muchlas dalam disertasinya yang berjudul *Hubungan Akibat Antara Turunnya Ayat-ayat al Quran dan Adat Kebiasaan dalam Tradisi Kebudayaan Arab Jahiliyah*, menjelaskan berbagai adat kebiasaan orang Arab dan bagaimana sikap al Quran terhadapnya. Melalui pendekatan sosiologis-antropologis, dia menganalisis keberadaan adat tersebut melalui jalur asbabun nuzul. Menurutnya, dasar dari diterima atau ditolaknya sebuah adat kebiasaan Arab jahiliyah oleh al Quran adalah demi memenuhi kebutuhan hidup manusia. Adat yang membawa kepada kemaslahatan yang besar akan diterima, tetapi yang membawa mudarat manusia akan ditolak atau dilarang.

Sedang Ali Sodiqin sendiri mengkaji al Quran dalam perspektif antropologi. Ia menguraikan enkulturasi al Quran terhadap tradisi Arab menghasilkan konsep reproduksi kebudayaan yang berdasarkan *worldview*-nya, yaitu tauhid atau monoteisme dan etika sosial atau moralitas. Dari keempat kajian di atas dapat disimpulkan bahwa Nasr Hamid dan Aksin Wijaya menggunakan pendekatan linguistik dan Muchlas menggunakan pendekatan historis sedangkan Ali Soqidin menggunakan pendekatan antropologi. Adapun yang penulis lakukan adalah kajian terhadap bahasa al Quran dalam perspektif politik kekuasaan. Bahasa yang digunakan al Quran adalah bahasa Arab. Dalam al Quran terdapat penjelasan mengenai bahasa yang digunakannya seperti yang terdapat dalam surah Yusuf ayat 2: Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.

Lagi pada surah al Syu'ara ayat 195 Allah SWT. menyatakan: "Dengan bahasa Arab yang jelas"

Pada dua ayat di atas paling tidak mewakili dari sebelas ayat yang menyatakan bahwa al Quran berbahasa Arab dan dengan 'lisan Arab yang nyata'. Perbincangan tentang bahasa Arab al Quran ini telah mendapat perhatian beberapa tokoh yang menimbulkan perdebatan, yaitu apa yang dimaksud dengan kata 'al Quran berbahasa Arab' pada ayat di atas? Apa yang dimaksud dengan ungkapan 'dengan lisan Arab yang nyata'? Apa yang melatar belakangi dipilihnya bahasa Arab (dari kaum Quraisy) menjadi bahasa al Quran? Apakah faktor politik kekuasaan merupakan faktor penting terpilihnya bahasa Arab (Quraisy) menjadi bahasa al Quran?

Demikian beberapa pertanyaan yang memerlukan pemikiran mendalam sehingga muncul perdebatan dikalangan para tokoh baik agama (ulama)

maupun para orientalis yang menaruh perhatian terhadap persoalan tersebut. Dalam ungkapan Ajid Thohir bahwa bahasa al Quran dikaji untuk menjaga keasliannya baik dari segi sebutan, makna maupun teks tulisan al Quran itu sendiri (Thohir, 2009: 58).

Adapun pembahasan ini difokuskan kepada dua pertanyaan yaitu: 1. Apa yang melatar belakangi dipilihnya bahasa Arab (dari kaum Quraisy) menjadi bahasa al Quran? 2. Apakah terdapat benang merah antara faktor politik kekuasaan suku Quraisy dengan terpilihnya bahasa Arab (Quraisy) menjadi bahasa al Quran?

Dari dua persoalan di atas, penulis berasumsi bahwa meskipun Allah SWT bersifat *transendent* namun dalam mengkomunikasikan wahyu untuk menjadi pedoman manusia, Dia tetap menggunakan media, sarana berupa bahasa yang notabene bahasa manusia yang bisa dikatakan sebagai bagian dari budaya manusia. Sebagaimana pendapat Ali Sodiqin bahwa proses penurunan al Quran mengindikasikan penggunaan pendekatan budaya dari pemberi pesan (Tuhan) kepada penerima pesan. Dari segi bahasa, al Quran menggunakan bahasa dari objek penerima, yaitu bahasa Arab. Penggunaan bahasa Arab sebagai media penyampai pesan Tuhan tentu memiliki pertimbangan efektivitas komunikasi (Shodiqin, 2008: 13).

Pada umumnya, sejarah mencatat bahwa siapa yang mempunyai otoritas, wewenang, *power*, dan *legitimete*, dialah yang berkuasa dalam menentukan atau paling tidak mengendalikan sesuatu pada waktu itu. Karenanya, penulis mencoba melihat bahasa al Quran ditinjau dari aspek politik kekuasaan suku Quraisy. Sedangkan kajian mengenai apakah bahasa Arab al Quran itu bersifat murni atau juga terdapat kata-kata yang berasal dari bukan Arab ('Ajam) serta maksud dengan ungkapan 'lisan Arab yang nyata' telah banyak di bahas oleh para tokoh. Misalnya pernyataan al Suyuti sebagai berikut (al Suyuti, Tt: 105):

قد أفردت في هذا النوع كتاباً سمّيته المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب وأنا ألخص هنا فوائده؛ فأقول: اختلف الأئمة في وقوع المعرب في القرآن، فالأكثر، ومنهم الإمام الشافعي وابن جرير وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر وابن فارس على عدم وقوعه فيه لقوله تعالى: { قرآناً عربياً }، وقوله تعالى: { ولوجعلناه قرآناً أعجمياً لئلا يقلوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي }، وقد شدد الشافعي النكير على القائل بذلك. وقال أبو عبيدة: إنما أنزل القرآن بلسان عربي متين. فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول ومن زعم أن كذاباً بالنبطية فقد أكبر القول. وقال ابن أوس: لو كان فيه من لغة غير العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها...“

## Politik dan Kekuasaan

### 1. Hubungan Politik dan Kekuasaan

Politik dalam tataran praktis didefinisikan sebagai usaha menggapai

kehidupan yang baik. Kehidupan itu sendiri memerlukan kebersamaan antara individu dengan individu yang lain sehingga terbentuk masyarakat. Kehidupan masyarakat merupakan kehidupan kolektif yang perlu diatur untuk distribusi sumber daya yang ada agar semua warga merasa bahagia dan puas. Lalu bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan tersebut? Agar tidak muncul berbagai pertentangan kehendak antara satu dengan yang lain, maka diperlukan kekuasaan. Politik dalam suatu negara berkaitan dengan kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*), dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*). Dari penjelasan ini paling tidak *term* yang harus dipahami yang berkenaan dengan politik adalah negara, kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*), dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*) (Budiardjo, 2008: 14).

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Dalam sistem ketatanegaraan, negara memiliki lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku. Dalam tataran ini maka politik merupakan semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif yang mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan itu. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Pembagian dan alokasi adalah pembagian dan penjabatan nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat. Pembagian dan alokasi nilai-nilai (yang dianggap baik dan benar) bersifat mengikat. Sehingga terkadang hal ini menjadi sumber konflik, oleh sebab ketidak meratanya nilai-nilai yang ditetapkan (Budiardjo, 2008: 17-21).

Kelima *term* di atas yang lebih dipahami oleh masyarakat umum bahwa politik lebih disandarkan kepada kekuasaan. Dengan kekuasaan, orang dapat

memerintahkannya kemauannya dan mengontrol kemauan orang lain. Dengan kekuasaan, perubahan dapat diciptakan sehingga pemimpin dapat mewujudkan visi dan obsesinya. Namun, kekuasaan seperti pedang bermata dua. Dengan kekuasaan, orang bisa membangun, tetapi juga bisa merusak. Jadi, kekuasaan mengandung paradoks, tergantung pada siapa yang akan melakukan apa (Alfian, 2009: 217-218).

## 2. Kekuasaan dalam Konteks Sosial

Kekuasaan selalu terkait dengan konteks sosial, interaksi dan konfigurasi sosial dan politik yang menyertainya. Dalam hal ini Sallie membagi kekuasaan yang terkait dengan tema-tema sosial dalam kekuasaan rasialis, kekuasaan kelas, kekuasaan gender, kekuasaan seksualitas serta kekuasaan visual dan spasial (Alfian, 2009: 219).

Kekuasaan rasialis adalah kekuasaan yang terbentuk berdasarkan ras dan identitas. Sedangkan kekuasaan kelas adalah kekuasaan yang terbentuk berdasarkan status ekonomi ala Marx. Kekuasaan gender adalah kekuasaan yang terwujud melihat kepada jenis kelamin khususnya laki-laki yang sering dianggap diskriminatif terhadap keadilan dalam mengakses sumber-sumber kekuasaan.

Kekuasaan seksualitas terbentuk dengan adanya relasi kuasa atas dasar seksual. Dan kekuasaan spasial adalah kekuasaan yang terbentuk berdasarkan wilayah dan perbatasan geografis. Sedangkan kekuasaan visual adalah kekuasaan yang bersumber dari dunia pencitraan (media massa). Siapa yang menguasai media massa sebagai alat pencitraan, maka ialah yang berkuasa.

## 3. Karakteristik Kekuasaan

Kekuasaan memiliki beberapa karakteristik. Pertama, kekuasaan merupakan sesuatu yang abstrak. Kedua, kekuasaan merupakan milik interaksi sosial. Ketiga, pemegang kekuasaan yang egois cenderung menyalahgunakannya. Penjelasan ketiga karakteristik kekuasaan di atas dijelaskan sebagai berikut (Alfian, 2009: 229-235):

- a. Kekuasaan itu abstrak artinya kekuasaan bukan sejenis benda yang bisa diraba atau dicium, tetapi hanya bisa dirasakan pengaruh dan dampaknya. Kalau ditegaskan, kekuasaan bersifat *illegible*, tidak kelihatan. Maka instansi tertentu membutuhkan seragam yang mencantumkan tanda pangkat. Contohnya polisi dan tentara. Beda pangkat, beda pula kewenangannya. Dampak kekuasaan dapat pula dirasakan dengan jelas. Keputusan hakim,

misalnya, berdampak langsung dan tidak langsung pada terdampak dan yang terkait dengannya.

- b. Kekuasaan adalah milik interaksi sosial. Kekuasaan cenderung identik dengan *social power*, maka ia harus berada dalam suatu sistem sosial. Harus ada komunitas sosial. Oleh karena itu, kekuasaan ada di mana-mana, di sekolah, di rumah, di kantor, di pasar, di pemerintahan, dan sebagainya. Karena harus ada sistem sosial, itu berarti melibatkan banyak orang.
- c. Interaksi sosial telah menjadi kata kunci tersendiri. Dalam teori komunikasi sosial, ada komunikator dan komunikan, ada subjek dan sarannya. Kemudian terjadi proses timbalbalik alias interaksi. Dalam proses interaksi, tentu ada dialog, ada tawar-menawar, termasuk yang terkait dengan implementasi kekuasaan.
- d. Kekuasaan cenderung disalahgunakan. Meskipun tidak semua, memang banyak pemegang kekuasaan yang tidak amanah dan menyalahgunakan kekuasaan. Lord Acton punya diktum yang kemudian menjadi sangat terkenal: *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*. Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut sudah pasti korup.

#### 4. Sumber dan Basis Kekuasaan

Sumber kekuasaan ada empat, yaitu (Wirawan dalam Alfian, 2009: ): 1) posisi, 2) sifat personal, 3) keahlian, 4) peluang untuk mengontrol informasi. Pendapat yang lain mengatakan bahwa sumber kekuasaan ada lima, yaitu: 1) legitimasi: otoritas, peraturan, undang-undang; 2) kontrol atas sumber keuangan dan informasi; 3) keahlian: kriticalitas; 4) hubungan sosial: kontak, pertemanan, kekuasaan dalam angka; 5) karakteristik personal, seperti kharismatik, menarik.

Sedang basis kekuasaan adalah sumber hubungan kekuasaan antara pihak yang mempengaruhi (agen) dan yang dipengaruhi (target). Basis kekuasaan berupa 1) paksaan; 2) imbalan; 3) persuasi; 4) pengetahuan. Dari basis kekuasaan ini, muncul istilah seperti kekuasaan paksa, kekuasaan imbalan, kekuasaan persuasi, dan kekuasaan pengetahuan (Alfian, 2009: 237).

#### Bahasa Arab dalam Rumpun Semit

Bahasa Arab termasuk rumpun bahasa Semit atau Semitik. Secara geografis, masyarakat yang mendiami kawasan Arab berasal dari satu ras manusia, yaitu Kaukasia dan Asia Barat. Asumsi ini diperkuat dengan penemuan arkeologia abad ke-18 dan ke-19 Masehi yang menunjukkan adanya masyarakat dan bahasa

yang oleh Perjanjian Lama disebut Semit) (Taufiqurrochman, 2008: 177).

Bahasa-bahasa Semit dapat digolongkan kepada: pertama, setengah kawasan bagian utara yang terdiri dari Timur meliputi Akkad atau Babylonia Assyria. Utara meliputi Aram dengan ragam timurnya dari bahasa Syria, Manderan, dan Nabatea, serta ragam baratnya dari Samaritan, Aram Yahudi dan Palmyra. Barat meliputi Feonisia, Ibrani Injil, dan dealek Kanaan lainnya. Kedua, setengah kawasan bagian selatan yang terdiri dari Utara meliputi Arab; Selatan meliputi Sabea atau Himyari, dengan ragam dari dialek Minea, Mahri, Hakili dan Geez atau Etiopik, dengan ragamnya dari dialek Togra, Amharik dan Harari (Taufiqurrochman, 2008: 178).

Dari semua bahasa Semit di atas kini telah punah kecuali bahasa Arab. Ketidakhadiran bahasa Arab ini disebabkan faktor kekuasaan dan faktor arabisasi. Faktor kekuasaan yang dimaksud adalah penghuni jazirah Arab yang meliputi tiga kelompok besar bangsa Arab yaitu:

1. Arab 'Ariba atau Badia (*Les Arabes Primaires*) seperti: kaum Ad, Tsamud, Amalik, Tasm, Bani Yadis, Kusyit, dan lain-lain.
2. Arab Muarriba (*Les Arabes Secondaires*) seperti: Bani Kahtan, atau Yoktan bin Heber, Bani Himyar, dan lain-lain.
3. Arab Musta'rib (*Les Arabes Tertiaires*) seperti: keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim as. Termasuk di dalamnya suku Quraisy.

Dari ketiga golongan besar bangsa Arab, pada akhirnya golongan yang ketiga atau Arab Musta'rib yang berkuasa. Lagi pula keturunan Nabi Ismail yang menguasai kota Makkah dan yang memelihara ka'bah.

Berkenaan dengan faktor kekuasaan ini (Thohir, 2009: 48-49) menjelaskan:

Apabila ingin mengetahui asal-usul suatu bahasa, tampaknya perlu mengetahui asal bangsa yang menjadi penutur utama bahasa tersebut. Hal demikian adalah karena bahasa itu dilahirkan oleh suatu masyarakat penggunanya dan pengguna bahasa itu membawa bahasanya ke manapun ia pergi. Kadang kala bahasa tersebut secara utuh terus dipertahankan oleh pemakainya, juga tidak sedikit yang melakukan perubahan, mengadaptasi dengan tempat atau situasi mereka tinggal, dimana ia bergaul dengan etnik-etnik lain yang memiliki bahasa berbeda. Perubahan bahasa biasanya akan terjadi oleh adanya perubahan generasi, dimana antara generasi terjadi asimilasi sehingga melahirkan model dan bentuk generasi baru dengan gaya bahasa atau karakter budaya yang relatif berbeda dari generasi sebelumnya. Bahkan tidak sedikit bahasa yang mati karena ditinggal oleh pemakainya. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor

politik seperti penjajahan yang menginvasi suatu wilayah bahasa, kemudian menggantikannya dengan bahasa si penguasa.

Banyak faktor yang menyebabkan mati dan hilangnya suatu bahasa dari setiap etnik, baik karena faktor politik kekuasaan, misalnya pelarangan menggunakan bahasa dari elite penjajah yang sedang berkuasa, hancurnya satu generasi etnik sebagai pengguna bahasa akibat fenomena alam seperti kaum Ad dan sebagainya (Thohir, 2009: 56):

Sedang faktor arabisasi berkata (Hana al Fakhuri, Tt: 5):

تغللاً والعربية من أحدث هذه اللغات نشأة وتاريخاً ولكن يعتقد البعض أنها الأقرب إلى في جزيرة العرب بعدلًا التي انبثقت منها اللغات السامية الأخرى. وذلك لاحتباس ملاً قيماسدا فلم تتعرض لما تعرضت له باقي اللغات السامية من اختلاط»

Arabisasi yang dimaksud di sini adalah bangsa Arab yang masih bertahan berbaur dengan bangsa lain sehingga melahirkan pergumulan bahasa antar bangsa yaitu berbaurnya suku pribumi dengan suku yang datang dari selatan. Selain pergumulan bahasa, perkawinan antar suku juga berakibat pada proses terjadinya arabisasi (Taufiqurrochman, 2008: 180).

### Sejarah Turunnya Al Quran: Aspek Sosio-Kultural

Al Quran diturunkan oleh Allah SWT, tidak hanya berkaitan dengan kondisi Nabi Muhammad SAW. yang telah lama bertahannuts, sikap dan apa yang dilakukan Nabi SAW ketika Jibril AS menyampaikan wahyu pertama. Namun kondisi penting yang dimaksud di sini yang berkaitan dengan persoalan di atas adalah kondisi sosial dan budaya yang terjadi di masa itu. Secara kultural, semenanjung Arab berada di tengah impitan budaya-budaya Mesir, Babilonia, dan Punjab. Masyarakat Arab tenggara kemungkinan menjadi penghubung antara Mesir, Mesopotamia, dan Punjab. Dilihat dari sisi geografisnya, tempat ini dapat digolongkan menjadi representasi budaya maritime (Sodiqin, 2008: 39-40).

Dari segi pengaruh kebudayaan luar, wilayah Semenanjung Arab terbagi menjadi dua bagian. Pertama, kawasan-kawasan yang sedikit sekali terkena dampak luar. Kawasan ini berada di jantung semenanjung Arab. Masyarakatnya kebanyakan suku-suku nomad yang tertutup (*clan oriented*). Partisipasi ekonomi di antara mereka tidak pernah terwujud. Fondasi struktur ekonominya dibangun berdasarkan kekuatan fisik berupa razia (*ghazw*) dan perompakan yang sudah menjadi semacam institusi sosial. Harta milik diperoleh dari rampasan perang, pembajakan, dan penjarahan ke berbagai kawasan. Mereka tidak mengenal hak privat. Bagi mereka, kekayaan suku adalah milik suku dan menjadi usaha

bersama. Karakter masyarakat nomad adalah individualisme dan semangat *ashabiyah* atau sukuisme. Hal ini menyebabkan mereka tidak pernah bisa mengangkat diri mereka sejajar dengan masyarakat di sekitar. Mereka sulit melakukan adaptasi dengan masyarakat luar. Komunitas di luar mereka adalah orang lain yang boleh diserang atau diajak damai.

Kedua, kawasan-kawasan yang mempunyai hubungan erat dengan dunia luar. Daerah ini berada di perkotaan dan wilayah-wilayah yang dekat dengan negara-negara besar. Masyarakatnya bergerak di bidang perdagangan. Kontak dagang dengan penduduk dari luar wilayah membuat interaksi sosial di antara mereka menjadi intensif. Hal ini yang menyebabkan masyarakat ini bersifat terbuka dan dinamis. Termasuk dalam kawasan ini adalah daerah Hijaz dan Yaman. Bangsa Arab mempunyai kebiasaan melakukan perdagangan dengan mengambil tempat di suatu tempat yang strategi dalam hal ini di kota Makkah (yang dikuasai oleh suku Quraisy), dimana di sana merupakan tempat berkumpulnya berbagai suku bangsa melakukan ibadah haji sekaligus mengadakan perdagangan. Sehingga transformasi sosial masyarakat terjadi lebih intens. Di sini bertemu berbagai elemen masyarakat dari berbagai daerah, sehingga pertukaran budaya tak terelakkan. Kebiasaan bangsa Arab yang lain adalah mengadakan perlombaan membuat puisi yang terbaik akan diumumkan dan digantung di Ka'bah. Isi dari puisi biasanya sekitar kepahlawanan seseorang, kejayaan suatu suku, namun bisa juga bersifat ejekan. Hasil dari karya tersebut kemudian diperlombakan dalam suatu even yang menarik.

Sebagaimana disampaikan (Syukur, 2002: 463) menulis:

وهو (القرآن) أنزل حينما يتفاخر العرب بالشعر الذي تعلق في الكعبة لمن يفوز من المباراة الشعرية. وتقوم المبارات الشعرية في موسم الحج. فيه احتشد أكثر أشرف العرب لا للمتاجرة فحسب وإنما يكون ذلك أيضا لفادة الأسرى والمفاخرة والتحكيم في الخصومات. فهذه تسمى الأسواق الأدبية

Dari penjelasan dua sumber di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat Arab mempunyai kebiasaan dalam mengekspresikan ide dan pikiran ke dalam bentuk puisi yang diperlombakan. Sedang tempat perlombaan tersebut biasanya pada waktu kegiatan transaksi perdagangan di suatu pasar yang disebut dengan pasar Ukkaz.

Dari pergumulan suku bangsa melalui transaksi perdagangan dan perlombaan membuat puisi juga terjadi pergumulan bahasa antar suku bangsa baik bangsa Arab maupun bangsa bukan Arab ('*ajam*). Di sinilah terlahir berbagai ungkapan-ungkapan bahasa baru yang mungkin sumber atau akar katanya bukan berasal dari bahasa Arab, kemudian menjadi atau dianggap

sebagai bahasa Arab. Dari pergumulan bahasa ini memunculkan bahasa Arab standar (*fusha*). Dan dari standarisasi bahasa Arab itulah para ahli puisi, ahli sastra menggunakannya dalam membuat puisi yang diperlombakan.

Bertitik tolak dari sejarah dan kultur suku bangsa Arab di atas, di mana telah terjadi pergumulan bahasa hingga memunculkan bahasa standar, maka pada waktu itu Allah Swt. menurunkan al Quran berbahasa Arab standar (al Suyuti, Tt: 105-106) mengutip pendapat Ibnu Nuqaiib berkata:

من خصائص القرآن على سائر كتب الله تعالى المنزلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم لم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم والقرآن احتوى على جميع لغات العرب وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبيشة شيء كثير.

### Bahasa Al Quran dan Politik Kekuasaan Suku Quraisy

Sebelum menjawab persoalan yang ditampilkan di bagian pendahuluan yang berkaitan dengan latar belakang dipilihnya bahasa Arab (Quraisy) menjadi bahasa al Quran dan pemilihan itu akankah berkaitan dengan faktor politik kekuasaan, ada baiknya kembali dipertegas kedudukan suku Quraisy di Makkah.

Pada aspek perdagangan, suku Quraisy diuntungkan dengan adanya Makkah di Hijaz sebab kota ini berada pada titik temu dua rute utama. Satu dari selatan dan utara, melalui Hijaz. Sedang yang lain adalah dari timur ke barat dari Irak, Iran dan daratan-daratan Erosia tengah ke Abisinia dan Afrika timur (Hodgson, 2002: 220).

Untuk mengurus segala kegiatan yang berkaitan dengan Makkah sebagai kota religi, mereka mengorganisir berdasarkan prinsip-prinsip Badui, tanpa memiliki seorang raja atau lembaga-lembaga kota praja apapun selain dewan-dewan klan; mereka menggunakan majelis para bangsawan dari semua klan untuk konsultasi yang tidak mengikat. Misalnya dalam penyelenggaraan ibadah haji, kegiatan keagamaan dan yang menyertainya (seperti tempat transaksi perdagangan, pasar), suku Quraisy berpartner dengan suku Tsaqif dan suku Tha'if.

Meskipun suku Quraisy tidak menerapkan sistem raja, namun mereka mampu memainkan peranan penting di negeri-negeri agraris dan dalam politik internasional. Mereka mampu membangun sebuah tatanan politik yang cukup efektif di atas dasar solidaritas sebuah suku dan gengsinya (Hodgson, 2002: 225). Namun demikian menurut Khalil, masyarakat Arab sudah memiliki ritus-ritus yang melembaga dan menjadi bagian dari adat istiadat mereka. Ritus tersebut meliputi ritus keagamaa, ritus sosial, pranata hukum, dan

aturan pembagian rampasan perang (Sodiqin, 2008: 19).

Organisasi kesukuan dibangun berdasarkan sistem demokrasi. Struktur kekuasaan tertinggi dipegang oleh kepala suku yang disebut dengan *shaikh*. Kepala suku dipilih berdasarkan keturunan atau sifat kebangsawannya. Kadang juga karena kekayaan, kebijaksanaan, atau pengalamannya. Organisasi suku ini yang ada hanya berlaku untuk satu suku saja, karena mereka alergi terhadap institusi yang berskala luas. Organisasi suku memiliki kedudukan yang vital dalam struktur masyarakat Arab (Sodiqin, 2008: 42).

Wilayah Hijaz, baik di Makkah maupun di Madinah tidak memiliki institusi atau organisasi negara. Di Makkah, yang merupakan kota perdagangan, otoritas masyarakat hanya dipegang oleh *mala*, semacam dewan klan atau senat yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil suku. Lembaga ini seperti lembaga musyawarah dan tidak memiliki hak eksekutif. Lain halnya di Makkah, di Madinah sebagai wilayah pertanian, tidak memiliki *mala*, dan malah tidak memiliki lembaga pemerintahan. Namun masing-masing suku mempunyai aturan sendiri yang dipegang oleh anggotanya. Hal ini kerap kali menimbulkan permusuhan antar suku, karena ketiadaan lembaga mediator. Secara khusus suku Quraisy memiliki institusi yang disebut *Dar al Nadwah* yang didirikan oleh nenek moyang mereka yaitu Qushay bin Kilab. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat diskusi dan musyawarah bagi para arsitokrat Quraisy. Lembaga ini memiliki wewenang dalam bidang agama, sosial, ekonomi, politik, dan hukum.

Dari apa yang dipraktikkan oleh suku Quraisy, mereka sangat berbeda dari teori strukturalisme-historis. Relasi kekuasaan dalam sebuah masyarakat ataupun negara selalu melahirkan bentuk piramidal. Yaitu sebuah piramida jaringan sosial yang terdiri dari tumpukan piramida-piramida kecil. Pada puncak piramida besar itulah kekuasaan terakumulasi, sehingga pada gilirannya bukan kekuasaan mayoritas mengontrol minoritas, melainkan elit minoritas yang mendekte perilaku kepentingan mayoritas. Sebagaimana bentuk piramid, bagian bawah merupakan lapisan terbesar yang berfungsi sebagai penyangga kepentingan sekelompok kecil elit penguasa yang berada di puncak piramida sosial (Hidayat, 1998: 97).

Dari paparan mengenai sistem politik dan kekuasaan yang dianut oleh wilayah Hijaz dan sekitarnya, terlebih otoritas dan wewenang yang dipegang oleh suku Quraisy, maka dapat dinilai dari lima *term* berikut, yaitu negara, kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*), dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*).

Pertama, dari aspek negara. Meski Quraisy hanyalah satu suku dari suku-suku yang terdapat di wilayah Hijaz, namun ia merupakan suku yang memiliki kedaulatan seperti layaknya sebuah negara. Hal ini bisa dilihat dari institusi yang ia miliki, yaitu yang diberi nama *Dar alNadwah* yang didirikan oleh Qushay bin Kilab, nenek moyang suku Quraisy. Juga lembaga yang disebut *mala*, semacam klan senat.

Kedua, dari aspek kekuasaan. Suku Quraisy memiliki kekuasaan di kota Makkah, terutama berkenaan dengan pemeliharaan dan pemanfaatan Ka'bah (ibadah haji) yang berada di sana; transaksi perdagangan yang ada di wilayah kota Makkah.

Ketiga, dari aspek pengambilan keputusan. Suku Quraisy memiliki tempat musyawarah. Segala permasalahan akan dipecahkan dan diputuskan berdasar hasil musyawarah yang disepakati.

Keempat, dari aspek kebijakan. Dari semua keputusan yang dihasilkan dan diambil suku Quraisy akan dilaksanakan sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

Kelima, dari aspek alokasi dan distribusi atau disebut pula pembagian tugas. Suku Quraisy memiliki pembagian tugas yang rapi sesuai bidang masing-masing sebagai berikut (Sodiqin, 2008: 57):

1. Abbas bin Abdul Muthalib bertugas menyediakan minuman bagi para jamaah haji.
2. Abu Sufyan bin Harb berwenang mengurus masalah hukuman.
3. Usman bin Thalhah mengurus pertahanan, keamanan, serta diplomasi.
4. Haris bin 'Amir menguasai bidang bantuan sosial.
5. Yazid bin Zam'ah bin Aswad mengurus bidang musyawarah.
6. Abu Bakar Ash-Shiddiq mengepalai masalah denda (*diyat*) dan perutangan.
7. Khalid bin Walid mengurus masalah perselisihan dan permusuhan.
8. Umar bin Khattab mengurus bidang perjalanan atau ekspedisi.
9. Sofwan bin Umayyah berwenang menangani masalah tawanan.
10. Haris bin Qais memiliki kekuasaan mengurus masalah berhalal-berhalal.

Adapun kaitannya dengan bahasa, Arkoun ketika memberikan pemahaman antara Islam dan al Quran adalah kebenaran yang mendalam yaitu tentang historisitas bahasa itu sendiri (Armas, 2004: 69-70). Diturunkannya al Quran

berbahasa Arab–dari penjelasan di atas adalah berkaitan erat dengan kondisi historis bahasa Arab yang telah terakumulasi dengan baik menjadi bahasa Arab *standard* yang didukung oleh kekuasaan suku Quraisy sebagai suku nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Sehingga boleh dikatakan terdapat benang merah antara pemilihan bahasa Arab standard (Quraisy) sebagai bahasa al Quran dengan faktor politik kekuasaan suku Quraisy. Dari ulasan di atas bisa dipahami bahwa bahasa Arab Quraisy yang dipilih oleh Allah SWT. adalah dalam rangka membantu para Rasul untuk menyampaikan dan menjalankan misi sucinya bersama kaum dan pengikutnya. Pemahaman di atas, berkaitan dengan pergumulan bahasa antara bahasa Arab dengan bahasa lain bahwa yang dimaksud dengan ‘lisan Arab yang nyata’ itu adalah bahasa suku Quraisy. Atau meskipun terdapat kata-kata dalam al Quran yang bukan berasal dari suku Quraisy, namun tetap dikategorikan bahasa Arab atau bahasa yang di-arabkan.

### Simpulan

Dalam penutup ini penulis simpulkan sebagaimana uraian di atas berdasarkan dua persoalan yang ditampilkan, yaitu: dari aspek sejarah, bahasa Arab dari Utaralah yang dapat bertahan karena dukungan aspek politik dan arabisasi yang dilakukan. Dari sinilah cikal bakal terakumulasinya bahasa standard (*fusha*) yang diakibatkan oleh pergumulan bahasa yang terjadi di kota Makkah dalam hal ini bahasa Arab Quraisy. Dari sistem politik yang di anut oleh suku Quraisy meski tidak mencerminkan kekuasaan absolut yang dapat mengikat suku bangsa yang lain menampakkan benang merah yang menunjukkan kaitan antara faktor kekuasaan dan terpilihnya bahasa Arab (Quraisy) menjadi bahasa al Quran.

### Daftar Pustaka

- Alfian, M. Alfian 2009. *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Al Suyuti. Tt. *Al Itqan Fi Ulum al Quran*, Tahqiq Muhammad Abu alFadhal Ibrahim. Beirut: al Maktabah aln‘Ashriyah.
- Armas, Adnin. 2004. *Pengaruh Kristen-Orientalis Terhadap Islam Liberal*. Jakarta: Gema Insani.
- Al Fakhuri, Hanna. Th. *Tarikh al Adab al Arabi*. Mansyurat al Maktabah al bulisiyah.

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, Komaruddin. 1998. *Tragedi Raja Midas, Moralitas Agama dan krisis Modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Hodgson, Marshall G. S. 2002. *The Venture of Islam*. Alih Bahasa Mulyadhi Kertanegara. Jakarta: Paramadina.
- Sodiqin, Ali. 2008. *Antropologi al Quran, Model dialektika Wahyu dan Budaya*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Syukur, Ahmad Abdul. 2002. *Intisyar al logah alArabiyah wa Musykilatuhu Fi Indonesia*. Volume ke- 40, Nomor 2: 463. Al Jami'ah.
- Taufiqurrochman, R. 2008. *Leksiologi Bahasa Arab*. Malang: UIN Malang Press.
- Thohir, Ajid. 2009. *Studi Kawasan Dunia Islam, Perspektif Etno-Linguistik dan Geo-Politik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.